

**KONFLIK LAHAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN BANDARA  
INTERNASIONAL  
DI KULON PROGO**

**Jurnal Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:**

**Akhmad Sopanudin  
12413244023**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**KONFLIK LAHAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN BANDARA  
INTERNASIONAL  
DI KULON PROGO**

**ABSTRAK**

Oleh;

Akhnad Sopanudin dan Grendi Hendrastomo

12413244023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena alih fungsi lahan yang terjadi akibat adanya kebijakan pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Setidaknya ada lima desa terdampak dari pembangunan bandara ini, yang menyebabkan lahan pertanian di masing-masing desa tersebut beralih fungsi menjadi bandara baru. Selain tujuan dari penelitian yang disebutkan tadi, peneliti bermaksud mengkaji masalah sosial yang muncul berupa konflik sosial di dalam masyarakat sebagai dampak dari pembangunan bandara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber yaitu; masyarakat terdampak baik itu pro atau kontra bandara, pemerintah daerah Kulon Progo, BPN, dan dari pihak Angkasa Pura I selaku pemrakarsa bandara baru. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dari pihak terkait, dan dari media cetak seperti koran dan jurnal. Dalam validitas data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi sumber data dan teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo akibat dari kebijakan pembangunan bandara baru menimbulkan beberapa dampak sosial. Adapun dampak tersebut yaitu bergesernya lahan pertanian menjadi bandara, hilangnya lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar, munculnya sikap pro dan kontra di masyarakat, dan munculnya konflik sosial. Adapun konflik sosial tersebut antara masyarakat yang pro dengan masyarakat kontra (*konflik horizontal*), dan masyarakat kontra dengan pemerintah daerah Kulon Progo (*konflik vertikal*). Masyarakat yang kontra tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal. Sikap masyarakat yang menolak karena mereka takut akan kehilangan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian mereka, baik sebagai petani (pemilik lahan) ataupun buruh tani (penggarap). Sementara itu masyarakat yang pro bandara mereka sebagian besar merupakan pemilik lahan sekaligus penggarap. Mereka yang pro bandara mengajukan beberapa persyaratan di antaranya; ganti rugi lahan mereka dan kompensasi lahan PAG, masalah ketenagakerjaan, dan relokasi gratis.

Kata kunci: *alih fungsi lahan, pembangunan, masyarakat, konflik*

**CONFLICT OF AGRICULTURAL LAND IN THE CONSTRUCTION OF AN  
INTERNATIONAL AIRPORT  
IN KULON PROGO**

By:

Akhmad Sopanudin and Grendi Hendrastomo

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the phenomenon of land conversion that occurs due to the new airport construction policy in Temon, Kulon Progo. At least five villages affected from this airport construction, which led to agricultural land in each village converted to the new airport. In addition to the purpose of the study mentioned above, researchers intend to examine the social problems that arise in the form of social conflict in society as a result of the construction of the airport. This research uses descriptive qualitative research method. The sampling technique using purposive sampling techniques. The source of the data obtained by researchers from informan, that is; affected communities, either pro or contra the airport, the local government of Kulon Progo, BPN, and of Angkasa Pura I as the initiator of the new airport. In addition, researchers also use secondary data in the form of documentation from the parties involved, and of print media such as newspapers and journals. The validity of the data used by the researchers are using a triangulation of data sources and data analysis techniques using data analysis design Miles and Huberman. Results from this study showed that the phenomenon of land conversion that occurs in Temon, Kulon Progo result of the new airport construction policy poses some social impact. As for the impact that the shifting of agricultural land into the airport, the loss of agricultural land as a source of livelihood of surrounding communities, attitude in the pro and contra in the community, and social conflict. As for the social conflict between the pro with the community contra (horizontal conflict), and the public counter with local governments Kulon Progo (vertical conflicts). Contra communities belonging to the group Wahana Tri Tunggal. The attitude of people who refuse because they fear the loss of agricultural land which has been the main source of their livelihood, either as farmers (landowners) or farm workers (tenants). Meanwhile the pro airports they are mostly landowners once tenants. They are pro the airport to ask some requirements of them; compensation for their land, and land compensation PAG, labor issues, and free relocation.*

*Keywords: land conversion, construction, community, conflict*

## I. PENDAHULUAN

Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Dean G Pruitt, 2011, hal. 10). Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menjadi dasar munculnya konflik sosial.

Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan bandara baru di Kulon Progo, yang berakibat pada terjadinya alihfungsi lahan pertanian. Setidaknya ada 5 desa terdampak pembangunan bandara ini yaitu: Desa Palihan, Glagah, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo. Mengingat pembangunan bandara ini cakupan wilayahnya yang luas, peneliti memfokuskan pada dua desa yaitu Desa Palihan dan Desa Glagah. Hal itu dikarenakan dua tersebut terkena dampak paling luas dan mengalami gejala masyarakat paling tinggi dibanding desa-desa lainnya, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui latar belakang munculnya konflik lahan di Kulon Progo, dampak yang ditimbulkannya, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik itu.

Relevansi antara tujuan penelitian dan kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan, karena mengingat bahwa pembangunan bandara sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan harapan mensejahterakan masyarakat sekitar, malah mendapat pertentangan dari masyarakat itu sendiri.

Penolakan pembangunan bandara dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara itu. adapun mereka yang menolak tergabung dalam paguyuban yang mereka beri nama Wahana Tri Tunggal (WTT). Mereka yang menolak menilai bahwa pembangunan bandara ini hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu mereka yang mempunyai modal. Sementara masyarakat yang berprofesi petani akan kehilangan lahan mereka.

Di sisi lain ketika ada kelompok masyarakat yang menolak

pembangunan bandara itu, ada masyarakat yang menerima atau pro bandara sehingga hal tersebut menimbulkan pertentangan (pro-kontra) atau konflik sosial di dalam masyarakat yaitu berupa konflik horizontal.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konflik Lahan Pertanian

Menurut Johara T Jayadinata mengartikan lahan sebagai tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya sudah ada pemilikinya, baik perseorangan maupun badan-badan tertentu (Jayadinata, 1999). Lahan merupakan suatu ruang lingkup di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Noor, 2006, hal. 98).

Suatu lahan biasanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan aktivitas manusia mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan suatu tempat dengan administrasi tertentu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitasnya demi

keberlangsungan hidupnya. Proses alih fungsi lahan sudah dipandang sebagai pemandangan yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas penggunaan lahan adalah bentuk fisik dari aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Rustiadi, 2001). Penggunaan lahan sering kali didasarkan pada jenis tanah, lokasi, dan faktor ekonomi tertentu.

Alih fungsi lahan akan menyebabkan beberapa masalah, yaitu akan hilang mata pencaharian mereka sebagai petani, hilangnya pendapatan dari penjualan hasil produksi mereka, menyebabkan mereka menjadi pengangguran, dan masih banyak lagi masalah sosial lainnya. Dalam sistem usaha tani, tanah (lahan) pertanian merupakan faktor produksi (komoditi) yang penting dan mempunyai nilai ekonomi tinggi (Sugihen, 1997, hal. 123-127).

Tidak menutup kemungkinan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Kulon Progo akan menyebabkan masalah sosial berupa bertambahnya angka pengangguran dikarenakan

kehilangan mata pencaharaan sebagai petani. Selain itu dengan adanya alih fungsi di Kulon Progo membuat lahan pertanian akan semakin sedikit, dan produksi pangan secara otomatis bisa berkurang.

## **2. Sengketa Lahan Sebagai Penyebab Konflik di Masyarakat**

Usmadi Murad (1991) menjelaskan bahwa kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan adalah lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan (Sembiring, 2009).

Di dalam bukunya Dean G. Pruitt, (2011: 10) mendefinisikan konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Artinya bahwa terjadinya suatu konflik sosial disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik tersebut bersifat kompleks yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya.

Permasalahan yang muncul di Kulon Progo yaitu; adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah masyarakat terdampak khususnya masyarakat yang menolak atau kontra (WTT). Masyarakat yang kontra mempertahankan apa yang menurut mereka menjadi hak mereka dalam hal ini lahan pertanian yang mereka garap. Sementara pemerintah Kulon

Progo melihat pembangunan bandara ini sebagai peluang membuka investor dan pengusaha, yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah Kulon Progo.

### 3. Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Pertanian

Rusmadi Murad (dalam Sembiring, 2009) menjelaskan bahwa kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan adalah lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan.

Dalam masalah sengketa lahan yang terjadi di Sumatera antara perusahaan dengan masyarakat setempat ada beberapa upaya yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut (Wahyono, 2003):

- a) Mengenai kepemilikan lahan harus diselesaikan secara hukum atau musyawarah.
- b) Adanya persuasif dari pemerintah dan investor, bahwa terjaminya kelangsungan perusahaan sangat penting untuk menghasilkan pendapatan negara dalam rangka menunjang pembangunan berbagai bidang.
- c) Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam manajemen perusahaan secara proporsional.
- d) Pemberian usul kepada pemerintah (pengambil keputusan) agar negaralah yang memberikan jaminan keamanan baik pada masyarakat maupun perusahaan.
- e) Perbaikan komunikasi, khususnya dari pejabat kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah paham.
- f) Perbaikan sistem atau tatanan yang menjamin keadilan bagi semua pihak.
- g) Kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.

Penyelesaian konflik khususnya mengenai sengketa lahan harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum di antara pihak-pihak yang berkonflik, jaminan keamanan bagi semua pihak, komunikasi yang baik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus menguntungkan masyarakat bukan untuk golongan tertentu maupun kepentingan pribadi, dan mencari *win-win solution*.

### III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif ini didasarkan pada temuan di lapangan yang sifatnya jamak, sehingga oleh peneliti dirasa lebih flexibel dengan menggunakan metode penelitian tersebut. Selain itu data-data yang sudah terkumpul dapat menjadi kunci jawaban yang sudah ada diteliti (Moleong, 2006, hal. 9-11). Berdasarkan fokus penelitian dan pengumpulan data-data yang telah diambil, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara wawancara atau tanya jawab antara peneliti dan informan sebagai narasumber (subyek penelitian), sehingga mampu

memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam masalah pembangunan bandara di Kulon Progo yang menjadi subjek penelitian di antaranya yaitu: masyarakat terdampak baik yang pro maupun yang kontra, kemudian dari Pemda Kulon Progo selaku yang membuat kebijakan tersebut, PT Angkasa Pura selaku pemrakarsa bandara, dan Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo selaku tim pelaksana pendataan dan inventarisasi lahan milik masyarakat.

Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada metode analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*).

### IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Informan

Secara garis besar letak geografis Kabupaten Kulon Progo sebagai

berikut

(<http://www.kulonprogokab.go.id/2014>):

- a. Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
- b. Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Provinsi DIY.
- c. Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Selatan : Samudra Hindia.

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa DIY sebagai tujuan para pariwisatawan lokal maupun mancanegara menjadikannya sebagai tempat pilihan untuk mengisi liburan maupun hanya sekedar jalan-jalan. Kulon Progo mempunyai beberapa tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Adapun tempat pariwisatanya meliputi pantai, pegunungan, sungai dan masih banyak lagi. Adapun lokasi pembangunan bandara baru di Kulon Progo terletak di Kecamatan Temon, tepatnya di lima desa terdampak yaitu Desa Palihan, Glagah, Sindutan, Jangkaran dan Desa Kebonrejo. Sementara yang dijadikan sebagai

lokasi penelitian yaitu di Desa Palihan dan Glagah.

Desa Palihan memiliki luas wilayah 354.7070 m<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 ini tercatat 3.049 jiwa. Adapun luas lahan yang akan dialihfungsikan menjadi bandara baru yaitu seluas 1.891.577 m<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Palihan, jumlah KK yang terdampak pembangunan baru ada 248 KK. Dengan rincian jumlah KK yang terdampak bandara dari masing-masing pedukuhan adalah; Dukuh Ngringggit (73 KK), Munggaran (44 KK), Kragon I (17 KK), Kragon II (72 KK), Tanggalan (39), dan Selong (3 KK).

Desa Glagah merupakan desa yang langsung bersebelahan dengan Desa Palihan. Seperti halnya Desa Palihan, desa ini juga terdampak langsung dari Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. Adapun luas wilayah Desa Glagah adalah 603.94 hektar, sementara luas wilayah yang terdampak seluas 2.836.389 m<sup>2</sup>. Di desa Glagah ada 3 pedukuhan yang terkenadampak paling luas dibanding pedukuhan lainya dari jumlah 9 pedukuhan yang ada. Adapun pedukuhan tersebut yaitu dukuh Kepek dengan jumlah 75 KK, dan

dukuh Bapangan berjumlah 57 KK. Masyarakat di kedua dukuh ini harus merelakan lahan PAG yang selama ini digarap oleh mereka, dan lahan mereka sendiri yang meliputi lahan tegalan, serta lahan pekarangan, yang nantinya akan direlokasi untuk pembangunan bandara.

Selain dari dua pedukuhan yang ada di atas, ada dukuh Sidorejo yang juga sebagian masyarakatnya kehilangan rumah, lahan pertanian, lahan tegalan, dan pekarangan sejumlah 31 KK.

Sementara itu data informan dalam penelitian ini meliputi: 21 narasumber yang terdiri dari: 6 masyarakat Kontra (4 anggota WTT, dan 2 bukan WTT), 7 masyarakat Pro, 2 narasumber dari PT Angkasa Pura, 1 narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo (BPN), dan 5 narasumber dari pemerintah daerah.

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Latar Belakang Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo**

Ada beberapa alasan kenapa perlunya pembangunan Bandara Internasional baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Angkasa Pura I 2015), yaitu:

a) Kapasitas terminal Bandara Adisutjipto tidak mampu lagi

menampung pesawat yang *take off and landing*. Adapun daya tampung Bandara Adisutjipto adalah 1,2 s.d 1,5 juta, sedangkan jumlah per 2014 sudah mencapai 6,2 juta penumpang.

- b) Kapasitas area parkir pesawat (apron) hanya menampung 7+1 (apron baru).
- c) Kapasitas landas pacu tidak mampu menampung pesawat berbadan lebar.
- d) Bandara Adisutjipto merupakan *civil enclave* milik TNI AU.
- e) Perlu adanya bandara baru yang representatif agar mampu memenuhi kebutuhan penumpang dan mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitar.
- f) Pengembangan di bandara lama, Adisutjipto tidak mungkin dilakukan lagi mengingat lahan yang terbatas.

Dari beberapa penjelasan di atas kalau dilihat kebutuhan akan transportasi udara yang baru di Yogyakarta memang dirasa perlu. Mengingat Yogyakarta sebagai destinasi para wisatawan baik mancanegara maupun lokal,

memerlukan jasa transportasi yang efektif, efisiensi, dan nyaman.

## **2. Konflik Lahan dalam Pembangunan Bandara di Kulon Progo**

Awal mula ada rencana pembangunan bandara di Kulon Progo sebenarnya sudah ada isunya ketika pemerintahan bupati periode sebelumnya yaitu pada saat pak Hasto menjabat sebagai Bupati Kulon Progo. Pada penghujung 2011 mulai muncul isu akan dibangunnya bandara baru di Kulon Progo. Pada tahun 2012 isu pembangunan bandara di Kulon Progo semakin santer terdengar, dan mulai menimbulkan pertentangan di masyarakat (pro dan kontra).

## **3. Latar belakang munculnya konflik lahan dalam pembangunan bandara ini yang melatar belakangi adalah sebagai berikut:**

### **a. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat.**

Perbedaan kepentingan setiap individu atau kelompok menjadi dasar atau faktor timbulnya konflik sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Dean G. Pruitt, (Pruitt, 2011); bahwa konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

### **b. Perbedaan pendirian dan Prinsip**

Prinsip atau pendirian setiap kelompok atau setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Suatu hal yang berkaitan dengan prinsip biasanya sifatnya sangat dasar (*fundamental*), sehingga hal tersebut akan sulit disatukan dan dapat menimbulkan konflik.

### **c. Perbedaan Sikap dan Persepsi Antar Masyarakat**

Masyarakat terdampak pembangunan bandara di antara mereka dalam menyikapinya berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan bersikap acuh. Sikap setuju (pro) ini ditunjukkan dengan penerimaan masyarakat terhadap proses

atau tahap-tahap yang berlangsung. Akan tetapi berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang kontra (WTT), mereka lebih kepada bentuk tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat kontra (WTT) melakukan penolakan dalam bentuk aksi demonstrasi, penghadangan kepada BPN dalam melakukan pendataan atau pengukuran tanah.

#### **4. Bentuk-bentuk Konflik yang Terjadi di Dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo**

##### **a. Konflik Kepentingan**

Dahrendof dalam bukunya (Poloma, 2013, hal. 134-135) menyatakan; secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan.

##### **b. Konflik Antar Kelas Sosial**

Konflik yang terjadi antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, konflik antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah yaitu

antara masyarakat petani yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal dengan Pemerintah Kulon Progo . Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antara dua golongan atau kelas sosial yang ada (Setiadi & Kolip, 2011, hal. 355). Selain konflik yang sifatnya vertikal dalam konflik di Kulon Progo juga terjadi konflik horizontal yaitu antara masyarakat pro dengan kontra.

#### **5. Peluang Munculnya Konflik antara Masyarakat Pro Bandara Dengan Pemerintah**

Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang tadinya pro bandara kemudian berubah menjadi menolak pembangunan bandara ini. Karena hal itu belum ada kepastian baik dari pemerintah maupun dari pihak pemrakarsa berkaitan dengan ganti rugi dan juga mengenai relokasi bagi masyarakat yang terdampak.

#### **6. Dampak Konflik dalam Pembangunan Bandara**

##### **a. Tidak Harmonisnya Hubungan Antar Warga**

Hubungan sosial di dalam masyarakat terdampak pembangunan bandara terjadi ketegangan sehingga menimbulkan perselisihan. Selain itu juga membuat masyarakat menjadi dua kutub yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat kontra.

**b. Lunturnya Budaya Gotong royong**

Lunturnya nilai-nilai budaya gotong royong pada masyarakat terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo terjadi akibat adanya pengkutuban atau terjadi *gap-gap*. Sehingga rasa saling peduli dan membantu di dalam masyarakat terdampak hanya sebatas pada kelompoknya sendiri antara yang pro dan kontra. Misalnya dalam hal *seripahan* atau ketika ada orang yang meninggal mereka yang datang adalah anggota kelompoknya sendiri. Contoh lainya lagi yaitu ketika ada hajatan berupa undangan, yang diundang hanya mereka yang

menjadi kelompoknya sendiri pro atau kontra.

**c. Meningkatnya Rasa Solidaritas In-Group Kelompok**

Dengan adanya konflik di masyarakat Kulon Progo membuat hubungan emosional antar anggota yang menjadi kelompoknya meningkat. Keterikatan emosional individu dengan individu lainya dipengaruhi oleh perasaan yang sama, adanya ancaman dari luar. Ini terjadi pada kelompok masyarakat yang kontra bandara yaitu Wahana Tri Tunggal (WTT). Mereka merasa senasib dan sepenanggungan bahwa selama ini mereka hidup menggantungkan seutuhnya pada lahan pertanian yang mereka garap baik lahan sendiri atau lahan PAG. Ketika terjadi alih fungsi lahan merkapun menolak untuk dijadikan pembangunan bandara.

**7. Upaya Penyelesaian Konflik**

Upaya penyelesaian konflik atau yang dikenal dengan istilah

*conflict management* menurut Rubenstein dalam bukunya Novri Susan (2014; 122-123) bahwa *conflict management* bertujuan memoderasi atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar konflik dan sebab-sebabnya, dalam artian semua konflik tidak perlu diselesaikan tetapi mempelajari cara mengelola berbagai konflik agar dapat mengurangi kekerasan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo dalam menangani konflik atau masalah mengenai pembangunan bandara yang menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam menghadapi masyarakat yang kontra (WTT). Pemerintah melakukan upaya-upaya dengan cara persuasif dan pendekatan-pendekatan secara inklusif kepada mereka yang menolak pembangun bandara ini. Selain itu juga pemerintah atau tokoh masyarakat memberikan penjelasan berupa sosialisasi mengenai pembangunan bandara itu. Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan dampak

positif dan dampak negatif pembangunan bandara tersebut.

Selain itu juga pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini PT Angkasa Pura I memberikan jaminan berupa lapangan pekerjaan dan juga ganti rugi lahan bagi yang berhak.

### C. Pokok-Pokok Temuan Penelitian

Adapun hasil temuan peneliti di lapangan di antaranya yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik lahan dalam pembangunan bandara di Kulon Progo yaitu: (a). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian, (b). Kekeliruan pendataan tanah yang dilakukan oleh BPN Kulon Progo, (c). Ganti rugi lahan masyarakat belum diketahui secara jelas, (d). Perbedaan sikap serta prespektif masyarakat pro dan kontra dalam menyikapi dan melihat pembangunan bandara.
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik ini yaitu: (a). Perubahan sikap dan kepribadian masyarakat dengan menaruh saling curiga satu sama lainnya, (b). Munculnya pengkutuban atau *gap-gap* antara masyarakat yang pro dan kontra, (c). Berkurangnya kepercayaan masyarakat,

khususnya yang kontra terhadap kredibilitas dan kepemimpinan pemerintahan DIY khususnya Pemda Kulon Progo.

3. Status Kepemilikan Lahan atau tanah, Kepemilikan tanah di wilayah terdampak pembangunan bandara setidaknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: a). Pemilik tanah, b). Dan penggarap lahan (Lahan yang bersertifikat dan PAG).
4. Masyarakat yang kontra atau menolak (WTT) pembangunan bandara sebagian besar adalah mereka yang tidak mempunyai lahan (penggarap). Adapun masyarakat kontra (WTT) ada yang mempunyai lahan (hak milik) namun tidak begitu luas.
5. Masyarakat yang kontra bandara ternyata ada beberapa yang memang bukan anggota atau ikut ke dama kelompok WTT.
6. Masyarakat yang pro bandara adalah kebanyakan dari mereka pro bersyarat. Setidaknya ada tiga tuntutan mereka yaitu; relokasi gratis, ganti rugi atau kompensasi PAG, dan masalah lapangan pekerjaan.
7. Lahan yang dijadikan bandara adalah lahan produktif, yang setiap

tahun menghasilkan berbagai tanaman buah-buahan dan palawija.

## V. BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konflik lahan dalam pembangunan bandara dapat ditarik kesimpulannya bahwa, ketika adanya kebijakan pembangunan yang memerlukan tempat berupa lahan di suatu daerah tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan, baik itu akan memicu terjadinya konflik atau sengketa lahan, perubahan sosial, ataupun beberapa permasalahan lainnya. Memang hal semacam itu tidak dapat terelakan lagi, apalagi mengingat karakteristik setiap masyarakat baik dilihat dari aspek nilai dan norma, serta kebudayaan pastinya akan berberda satu dengan yang lainnya.

Konflik lahan atau sengketa lahan yang ada di Kulon Progo disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian sebagai pembangunan bandara. Selama ini lahan yang berada di sebelah pantai selatan di Kecamatan Temon merupakan lahan atau tanah milik Pakualaman (PAG). Sementara itu

sebelahnya lagi merupakan lahan milik warga yang memang mempunyai sertifikat.

Konflik yang terjadi di Kulon Progo berkaitan dengan pembangunan bandara bersifat horizontal dan vertikal. Konflik horizontal terjadi antar masyarakat itu sendiri yaitu antara warga yang pro dan kontra bandara.

Upaya penyelesaian konflik atau *conflict management* sebagai bentuk mempelajari cara mengelola berbagai konflik agar dapat mengurangi kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Selain itu juga pentingnya melakukan pengelolaan konflik secara baik dengan melakukan pemetaan-pemetaan masalah yang ada, dan merekonstruksikan konflik di dalam suatu masyarakat yang sedang berkonflik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan temuan-temuan hasil penelitian ada beberapa saran atau masukan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pembangunan bandara tersebut. Selain itu juga sekiranya menjadi acuan atau

bahan evaluasi kedepannya dalam menjalankan suatu pembangunan di suatu wilayah. Adapun beberapa saran atau masukannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan suatu program pembangunan nasional di suatu wilayah, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan rencana yang matang. Hal tersebut berkaitan dengan AMDAL, baik sebelum atau sesudah dilakukannya pembangunan itu, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.
2. Alih fungsi lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, mengingat sektor pertanian yang semakin sempit dan sedikit. Hal itu berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional. Selain itu juga lahan yang dijadikan tempat berdirinya bangunan perlu adanya peninjauan ulang, apakah tanah atau lahan itu produktif atau tidak.
3. Pemerintah atau instansi terkait perlu mengadakan ganti rugi yang pas dan sesuai kepada masyarakat terdampak.

- Keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan ganti rugi kepada mereka yang terdampak juga penting.
4. Melibatkan masyarakat terdampak pembangunan dari mulai tahap-tahap pembangunan ataupun setelah pembangunan selesai. Memprioritaskan masyarakat terdampak, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya dengan disesuaikan dengan potensi dan keahlian SDM-nya.
  5. Masyarakat khususnya daerah pedesaan perlu adanya sikap dan sifat kedewasaan dalam menerima kebijakan pemerintah, dan ikut aktif dalam membuat dan mengontrol jalannya suatu kebijakan.
  6. Masyarakat terdampak perlu adanya saling kerjasama antar warga dan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Bisa dengan jalan musyawarah, mediasi, dan sebagainya.
  7. Pemahaman mengenai suatu peraturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (UU No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya harus dipahami bersama, khususnya masyarakat.
  8. Pembangunan yang dilaksanakan harus berlandaskan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dean G Pruitt, J. Z. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Noor, D. (2006). *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustiadi, E. (2001). *Alih Fungsi Lahan dalam Prespektif Lingkungan Perdesaan*. Bogor: IPB.

Sembiring, J. (2009). Konflik Tanah di Indonesia. *No. 3 Vol. 16*, hal. 341.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan* (Cetakan ke-3 ed.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sugihen, B. T. (1997). *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Wahyono, T. (2003). Konflik Penguasaan Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatra. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 11 (1): 47-59.

(<http://www.kulonprogokab.go.id/>  
*Sumber: BPJS-update 28/01/2016, diakses pada 12-02-2016, pukul 14.40*)